

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS.**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :
LATIFAH NUR ISNAINI**

10300116024

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifah Nur Isnaini

Tempat/Tgl. Lahir : Toabo, 29 Maret 1999

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Samata, Gowa

Judul : Analisis Perbandingan Hukum terhadap putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs tentang gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Maros

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Samata, 18 Agustus 2020

Penulis



Latifah Nur Isnaini

10300116024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros” yang disusun oleh Latifah Nur Isnaini, NIM 10300116024, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Agustus 2020

28 Dzulhijjah 1441 H

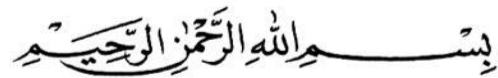
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Zulhas'ari Mustafa, S.Ag., M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahma Amir, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Achmad Musyahid, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H	(.....)

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan berbagai macam rintangan dan kesulitan dalam menyelesaikannya, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terimakasih terutama dan yang paling utama kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Mulkan Yasin dan ibunda Jami'ah yang tercinta. Karena atas do'a dan usaha mereka yang tiada hentinya, penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A.,Ph.D.** selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas yang baik sehingga penulis bisa mengikuti perkuliahan dengan baik
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc, M.Ag.**,selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya yang telah membantu membimbing penulis dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi penulis

3. Bapak **Dr. Ahmad Musyahid Idrus, S.Ag.,M.Ag.**, selaku ketua jurusan perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar serta selaku pembimbing I dari penulis yang sangat banyak dan besar bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi
4. Bapak **Dr. Abdi Wijaya, S.S.,M.Ag.**, selaku sekretaris jurusan perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
5. Bapak **Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing II penulis yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dan para staf pengajar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta.
7. Teruntuk sahabat dan teman-teman yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, yang selalu ada disaat penulis lagi butuh hiburan disela-sela penulisan skripsi ini
8. Terkhusus untuk teman-teman kelasku PMH A tercinta, terima kasih banyak telah banyak membantu dan mendukung penulis dari awal penulisan skripsi sampai selesai, semoga kita semua bisa wisuda dan keluar dari kampus tercinta bersama-sama

Kepada semua pihak yang telah membantu dari awal penyusunan sampai selesai skripsi ini, mungkin ucapan terimakasih tidak cukup untuk membalas semua bantuan dari semua pihak, tapi penulis hanya bisa mendo'akan semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat kedepannya,

Samata, 18 Agustus 2020

Penulis



LATIFAH NUR ISNAINI
10300116024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Pengertian Nikah (kawin).....	11
B. Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	12
C. Dasar Hukum Harta Bersama.....	16
D. Pembagian harta Bersama.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Instrumen Penelitian.....	26
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	27
G. Pengujian Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Profil Lembaga Penelitian.....	28

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros.....	32
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros.....	34
D. Gambaran Umum Pemeriksaan Perkara Harta Bersama Yang Terletak Di Du Yurisdiksi Pengadilan.....	36.
E. Analisis Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs.....	38
F. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Maros Terkait Dengan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs.....	43
G. Pandangan Yuridis dan Pandangan Fiqih Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs	38
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66.
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

أَمَرَ : *āmar*

قَالَ : *qāla*

يَأْمُرُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

أَعْضُورٌ لَّا لَافِطٌ : *rauḍah al-atfāl*

مَدِينَةٌ فَاضِلَةٌ : *al-madīnah al-fāḍilah*

مَكْحَلٌ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

حَقًّا : *al-ḥaqq*

نُعْنُ : *nu'ima*

وَدَّع : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

أَلِيع : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَرَبِع : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

سَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

فَلْسَفَة : *al-falsafah*

بَلَادَة : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تُورمَات : *ta'murūna*

عَوْنَة : *al-nau'*

سَيَّءٌ : *syai'un*

تُرْمَة : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (لجلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مَحْرِي *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta ‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Latifah Nur Isnaini

NIM : 10300116024

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Tentang Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, serta untuk mengetahui alur penyelesaian sengketa dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pendekatan syar'i yang dimana pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan penulisan ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pertimbangan yang kuat dan harus memiliki dasar yang kuat sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan dan dasar-dasar yang digunakan tentunya harus berlandaskan Undang-Undang yang berlaku. Para hakim yang akan memutuskan perkara harus mengutamakan kepentingan Penggugat agar kedepannya tidak akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan yang melanggar syara' yang diakibatkan oleh ketidakpuasan Penggugat akibat merasa bahwa putusan tersebut mendiskriminasi Penggugat.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan KHI yang berlaku. *Kedua*, pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dengan menolak salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu mengenai mahar yang disebabkan karena kurang pihak. *Ketiga*, yaitu mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam

mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketaanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *Nikah* (نكاح) dan *Zawaj* (زواج).¹ Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Arab lebih sering menggunakan kedua kata tersebut. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak juga terdapat kata *Nakaha* yang artinya “kawin”.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.²

Allah telah memilihkan jalan kepada manusia dan makhluk lainnya untuk berkembang biak, beranak-pinak, dan melestarikan hidupnya melalui sebuah perkawinan. Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk-makhluk lainnya yang berhubungan bebas mengikuti nalurinya. Allah juga menjaga kehormatan dan meninggikan derajatnya manusia dengan memberikan hukum sesuai dengan martabatnya.

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “harta” berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

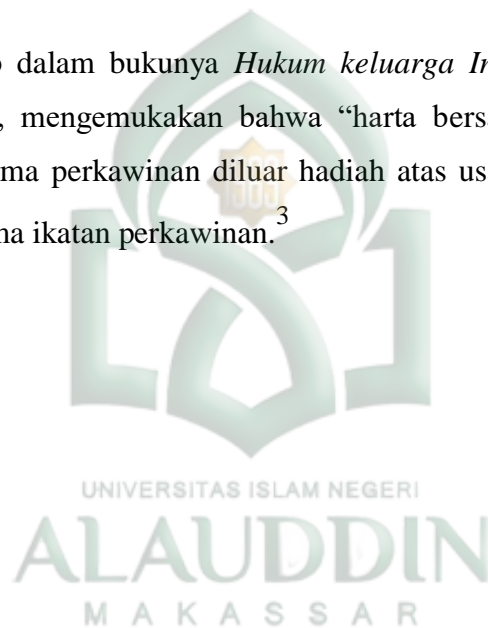
¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), h. 73

² Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura : Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2, h.30

Di dalam *Tartibul kamus al-Muhithu* harta berarti segala sesuatu yang dimiliki .
“sama” yang berarti serentak,sekalian. Dengan demikian harta bersama berarti
harta yang diperoleh secara bersama-sama didalam perkawinan.

Hazairin yang dikutip oleh Sudarsono dalam buku *Hukum Perkawinan Nasional* menjelaskan bahwa “segala sesuatu yang diperoleh suami atau istri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama-sama menjadi harta bersama dalam perkawinan”.

Sayuti Talib dalam bukunya *Hukum keluarga Indonesian* yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mengemukakan bahwa “harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atas usaha bersama-sama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.”³



³M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Alauddin University Press, 2012), h. 141-142

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan kedua belah pihak juga dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini suami dan istri.

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada ayat (2) dikatakan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 ayat (1) di atas dapat diartikan bahwa sejak dimulainya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pada Pasal 36 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian harta terpisah, suami dan istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan Pasal diatas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah

secara hukum, yang artinya perbuatan hukum yang dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁴

Pada Pasal 37 ayat (1) dikatakan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sudarsono mengatakan bahwa, Pasal 37 ditujukan kepada hukum bersama yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya, bila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukum agama bekas suami istri dan jika tidak mempunyai hukum tentang harta bersama, maka berlakulah hukum adat, jika mereka tidak pula tidak mempunyai hukum adat tentang harta bersama, maka dijalankan hukum tertulis tentang harta bersama yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁵

Di dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud melakukan penyimpangan dari ketentuan itu, suami dan istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 dan 154 KUH Perdata.

Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.⁶

⁴ Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 130-131

⁵ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 144-145

⁶ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008), h. 104-105

Tidak di semua Negara Islam terdapat sengketa harta bersama. Di dalam masyarakat yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Di dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mencakup hal-hal tentang pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, istri mendapatkan imbalan atau nafkah dari suami atas loyalnya istri kepada suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah milik suami, tidak dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Namun lain halnya terhadap masyarakat Islam yang adat istiadatnya tidak lagi berlaku pemisahan antara harta suami dan istri. Harta pencarian suami bercampur dengan harta pencarian istri. Pemberlakuan hukum seperti ini akan menimbulkan rasa kebersamaan antara suami dan istri dan menganggap pernikahan mengandung persetujuan kongsi dalam rumah tangga. Dengan demikian seluruh harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan dari jerih payah siapa untuk mendapatkan harta tersebut.

Masalah harta gono gini atau yang biasa disebut dengan istilah harta bersama sudah sangat melekat dalam kehidupan pasangan suami istri di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai gugatan harta bersama yang letak sengketaanya berada di dua yurisdiksi pengadilan atau yang biasa di sebut denga *Forum rei sitae*.

forum rei sitae adalah prinsip berdasarkan minimum contacts dan prinsip berdasarkan yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi situs atau tempat benda tidak bergerak yang secara langsung

ataupun tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi untuk dapat menentukan status kepemilikan benda. Kewenangan pengadilan untuk menerapkan *Forum rei sitae* terbatas hanya untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan benda tetap yang terkait dengan perkara dan berada di wilayahnya .

Disini penulis akan melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pokok masalah terhadap judul “**Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Maros**” :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Harta Bersama yang terletak di dua Yurisdiksi Pengadilan ?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros terkait dengan Gugatan Harta Bersama dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs ?
3. Bagaimana Pandangan Yuridis dan Pandangan Fiqih Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Maros ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada Analisa perbandingan hukum terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa bagian penting, antara lain :

- a. Analisis adalah segala bentuk aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai dan membedakan sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriterianya kemudian dicari kaitannya atau hubungannya setelah itu ditafsirkan maknanya.
- b. Gugatan adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui lembaga peradilan.
- c. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, baik yang dihasilkan oleh suami atau isteri dan berada didalam kekuasaan suami istri secara bersama-sama.
- d. Pengadilan adalah sebuah forum public, yang dimana kekuasaan diterapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan terhadap para pencari keadilan.

D. Kajian Pustaka

1. Siti Mahmudatun Nihayah (2016) didalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)” didalam penelitian tersebut membahas

tentang dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan besaran pembagian harta bersama terhadap adanya kontribusi yang berbeda dan implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributif di Pengadilan Agama Semarang.

2. Ismihayati (2010) didalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan” didalam penelitian tersebut membahas tentang penyebab terjadinya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dan pandangan masyarakat di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang terhadap pembagian harta bersama berdasarkan besarnya kontribusi dalam perkawinan.
3. M. Khairin (2014) didalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta (Analisis Putusan No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska)” didalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan hukum acara perdata didalam peradilan tentang pembagian harta bersama dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta bersama.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

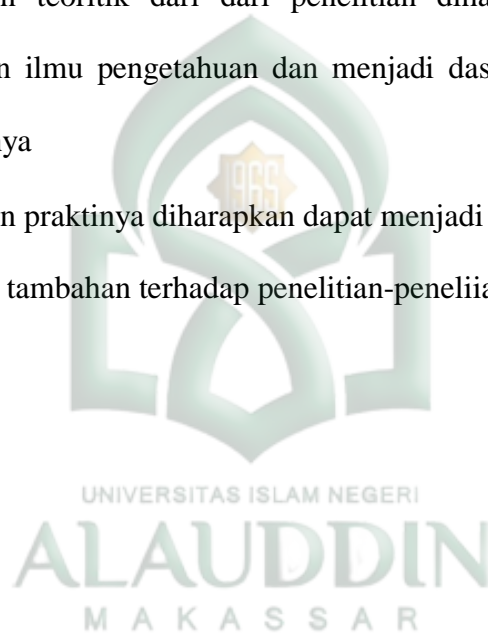
1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa harta bersama yang terletak di beberapa yurisdiksi pengadilan

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Harta Bersama yang terletak di dua Yurisdiksi Pengadilan.
- c. Untuk mengetahui analisis perbandingan hukum terhadap putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs tentang gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Maros.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritik dari dari penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar penelitian-penelitian selanjutnya
- b. Kegunaan praktinya diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi tambahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nikah (Kawin)

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *Nikah* (نِكَاح) dan *Zawaj* (زَوَاج).⁷ Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Arab lebih sering menggunakan kedua kata tersebut. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak juga terdapat kata *Nakaha* yang artinya “kawin”.

Beberapa ulama fiqih masing-masing memiliki pendapatnya sendiri mengenai makna dari perkawinan, antara lain mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin ataupun yang semakna dengan itu. Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.

Menurut asalnya, perkawinan hukumnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun orang-orang yang hendak melakukan perkawinan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda, untuk itu jumhur ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan tersebut kedalam beberapa keadaan, antara lain :

1. Sunnah, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki keadaan normal. Misalnya apabila dia tidak melakukan perkawinan dia tidak akan berbuat zina dan tidak akan berbuat zalim terhadap siapapun.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 73

2. Makruh, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang belum siap, belum pantas, dan belum memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Hukum ini berlaku juga untuk orang-orang yang mengalami cacat fisik dan mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan ditakutkan akan menzalimi istrinya.
3. Wajib, hukum ini berlaku bagi orang yang sudah siap, pantas, dan mampu untuk melakukan perkawinan, dan memiliki kekhawatiran dalam dirinya akan terjerumus kedalam kemaksiatan apabila tidak segera menikah.
4. Haram, hukum ini berlaku bagi orang-orang tidak siap untuk menikah dan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya setelah menikah, dan dia yakin akan berbuat zalim nantinya terhadap istrinya.
5. Mubah, hukum ini berlaku bagi orang yang belum mendapatkan dorongan untuk melakukan perkawinan dan perkawinan itu sendiri tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi siapapun.

Sedangkan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami isteri

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “harta” berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.⁸ Di dalam *Tartibul Kamus al-Muhithu* harta berarti segala sesuatu yang dimiliki.⁹ Dengan demikian Harta Bersama berarti harta yang diperoleh secara bersama-sama di dalam perkawinan.

Dalam buku *Bahan Penyuluhan Hukum Islam* dijelaskan bahwa : Di “Syirkah atau harta kekayaan di dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diantara suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta seperti ini selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁰

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 299

⁹Thahir Ahmad Zawi, *Tartibul Kamus al-Muhithu* (Cet. II; Juz IV; t.p Darul Fikr, 1607), h. 298

¹⁰Departemen Agama RI., Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum, Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Undang-undang No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta.t.p.1966/1977), h. 109

Pada dasarnya di dalam hukum Islam tidak terdapat adanya harta bersama atau percampuran harta suami dan istri dalam perkawinan. Harta suami tetap menjadi harta suami, begitu pula dengan harta istri selama tidak ada perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, suami tidak berhak atas harta isteri dan istri tidak berhak pula terhadap harta suami.

Di dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama adalah harta yang diperoleh melalui jalan *syirkah*, sehingga terjadi percampuran harta antara suami dan istri .

Kekosongan sumber hukum yang menjelaskan masalah harta bersama di dalam Al-Qur'an, Ny. Soemiyati SH mengemukakan bahwa ;
 “Al-Qur'an mapun Hadts Nabi, tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan, menjadi harta bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan ijtihad, yaitu dengan penggunaan akal pikiran manusia, hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dan sesuai dengan jiwa ajaran Islam¹¹

Penjelasan Soemiyati tersebut searah dengan pandangan Drs. Sudarsono SH, beliau menjelaskan bahwa :

“Al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, bahwa segala usaha masing-masing atau usaha bersama menjadi harta bersama dalam perkawinan. Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan juga tidak diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut menjadi hak otonomi masyarakat Islam untuk mengaturnya secara *syura bainahum*.¹²

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 99

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, h.

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu'ul mauamalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pegarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan orang Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu juga berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya beliau mengatakan, oleh karena pencaharian bersama suami istri ini adalah termasuk pengkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakana bahwa harta bersama masuk pembahasan *syirkah muwafadah dan abdan*.¹³

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.¹⁴

Sedangkan menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

Pertama, Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu : 1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri; 2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing; 3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

¹³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No 7 Tahun 1989 (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 270-271

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung; Mandar Maju, 2007), h. 176

Kedua, Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk: 1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak; 2. Harta kekayaan yang lain.

Ketiga, Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa; 1. Harta milik bersama; 2. Harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga; 3. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.¹⁵

Sedangkan menurut hukum positif, pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh setelah suami istri berada di dalam ikatan perkawinan yang sah. Harta bersama ini disebut juga sebagai harta pencarian. Sedangkan harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami istri yang didapat sebelum berlangsungnya perkawinan, harta tersebut biasanya berupa warisan, hibah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama tersebut diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam Pasal tersebut yang jelas adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta bersama tersebut.¹⁶

Sedangkan menurut pengertian hukum adat, harta perkawinan adalah harta yang dikuasai suami istri selama dalam ikatan perkawinan, baik itu harta perorangan, harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama, dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal untuk membiayai kehidupan rumah tangga lainnya.

C. Dasar Hukum Harta Bersama

¹⁵Sayuti Thalib, 1974:83

¹⁶Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Alumni, Bandung : 1978)

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, banyak disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan melalui jalan syirkah sehingga mengakibatkan bercampurnya harta milik suami dan istri. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32 :

وَلِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَّةِ الْبَاقِيَّةِ

Terjemahan :

(karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka sahkan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.¹⁷

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dala Al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjonon dan Andoerraoef serta diikuti oleh murid-murindnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tetang harta bersama ini, sedangkan hal-hal yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadits dan Al-Hadits ini merupakan sumber hukum Islam juga. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.¹⁸

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Di dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta syarikat (dusebut juga *syarikat*, *syarkat*, dan *syirkat*), yaitu; 1. *Syarikat 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; 2.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 83

¹⁸ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Percetakan Mustika , 1977), h. 119

Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya; 3. *Syarikat Mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; 4. *Syarikat wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Indonesia, sejak dulu hukum adat sudah mengenal adanya hukum bersama dan sudah diterapkan menjadi sebuah hukum yang hidup. *‘Urf* atau yang biasa dikenal sebagai adat kebiasaan adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi, baik itu yang berupa ucapan, perbuatan, dan dalam meninggalkan sesuatu. Para ulama mengatakan “adat itu adalah syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum” atau yang biasa dikenal dengan “*al-adatu al-muhakkamah*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersolakan terdaftar atas nama siapapun. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk memanfaatkan dan menjaga harta tersebut dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa harus adanya persetujuan dari pihak lain.

Harta bersama juga diatur secara singkat dan umum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab VII, yaitu dalam Pasal 35,36, dan Pasal 37.

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri yang berupa hibah ataupun warisan selama dalam perkawinan berlangsung.

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang jerih payah siapa harta itu diperoleh, baik itu hasil kerja suami atau istri. Dalam Pasal tersebut hanya dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta milik bersama suami dan istri.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan harta bersama, maka tindakan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau

istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.¹⁹

Kesimpulan dari ketiga Pasal tersebut yaitu Pasal 35-37 adalah bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Harta masing-masing suami dan istri yang berupa hibah dan warisan berada dalam pengawasan atau kuasa masing-masing pihak sepanjang tidak ada perjanjian yang lain atas hal itu. Suami dan istri mempunyai hak masing-masing terhadap harta tersebut sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apabila perkawinan putus karena perceraian, dan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan di dalam KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*, yang diatur dalam Pasal 105 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Suami adalah kepala persekutuan suami istri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)”, sedangkan istrinya harus patuh kepada suaminya (Pasal 106 KUH Perdata).

Dalam Pasal 108 KUH Perdata menyatakan : “Bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu dari suaminya”. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi isteri.

Selanjutnya dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan

¹⁹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.²⁰

Sedangkan menurut Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, suami diberi wewenang yang sangat besar untuk mengurus (*Beheren*) harta kekayaan dalam perkawinan. *Beheren* disini dalam arti luas yaitu mengelola. Pengelolaan yang meliputi tindakan pengurusan (*Beherr*) dalam arti sempit dan tindakan memutus (*Beschikken*). *Beheren* jika diartikan dalam arti sempit sesuai dalam Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata meliputi semua perbuatan untuk memelihara harta kekayaan itu tetap utuh dan berbuah, atau melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, sehingga harta kekayaan tersebut dapat menghasilkan.

D. Pembagian Harta Bersama

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum "*tidak ada kemudaratkan dan tidak boleh memudaratkan*". Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.²¹

Pembagian harta bersama harusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan istri. Apabila nantinya terjadi perselisiham, maka rujukannya kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁰ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006-2008), h. 104-105

²¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa : *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama).*

Mengenai pembagian harta bersama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya adalah diatur menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama itu sendiri. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 96 dan 97. Dalam Pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seperti halnya yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 128 menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, maka kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan lagi darimana asal barang-barang tersebut.

Dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Maksud dari Pasal ini sama adalah setelah adanya akad nikah antara suami dan istri maka terjadi perkongsian dalam hal perekonomian keluarga. Maka dari itu masing-masing dari suami dan istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Perbedaanya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.²²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Maros, kec. Turikale, kab. Maros. Penulis memilih lokasi tersebut karena di Pengadilan Agama Maros terdapat kasus tentang sengketa harta bersama yang letaknya lebih dari satu yurisdiksi pengadilan yang kasusnya langsung ditangani oleh hakim di Pengadilan Agama Maros.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis merupakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang menjadi bahan itu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

²² <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html> (15 oktober 2019)

2. Pendekatan Normatif syar'i merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits-hadits, dan pendapat para ulama.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu berupa wawancara, observasi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, atau yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah resmi, misalnya seperti buku-buku, jurnal, ataupun arsip-arsip yang sudah dipublikasikan.

D. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan masalah, tujuan, dan sumber data, maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Metode yang dilakukan dengan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dan terpercaya dari sumbernya langsung. Yang dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan kepada narasumber.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena

itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²³

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah suatu kegiatan untuk menghimpun data-data atau menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang tertulis seperti buku-buku, catatan, foto atau gambar-gambar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.²⁴

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan alat tulis.

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan untuk mewawancarai narasumber atau informan. Secara garis besar, pedoman wawancara terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara.

²³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), h. 115

²⁴ Muhammad Ilyas Ismail, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar : Alauddin University Press, 2015), h. 139

2. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti dan data yang akurat pada saat penelitian. Misalnya seperti kamera, handphone, atau alat perekam lainnya.

3. Alat Tulis

Alat tulis adalah alat yang digunakan untuk menulis data-data yang didapatkan di lapangan ataupun yang didapat melalui informan sebelum disusun kedalam dokumen penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah teknik yang dilakukan untuk mengolah data-data mentah yang didapatkan di lapangan yang kemudian dijadikan sebagai data-data yang ilmiah dan sistematis.

2. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

²⁵ Kamaluddin Tajibu, *Metode Penelitian Komunikasi* (Cet.I; Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 220-221

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsaha data adalah pengujian yang dilakukan untuk menjamin keakuratan suatu data. Karena data-data yang salah akan menarik kesimpulan yang salah, begitupun sebaliknya.



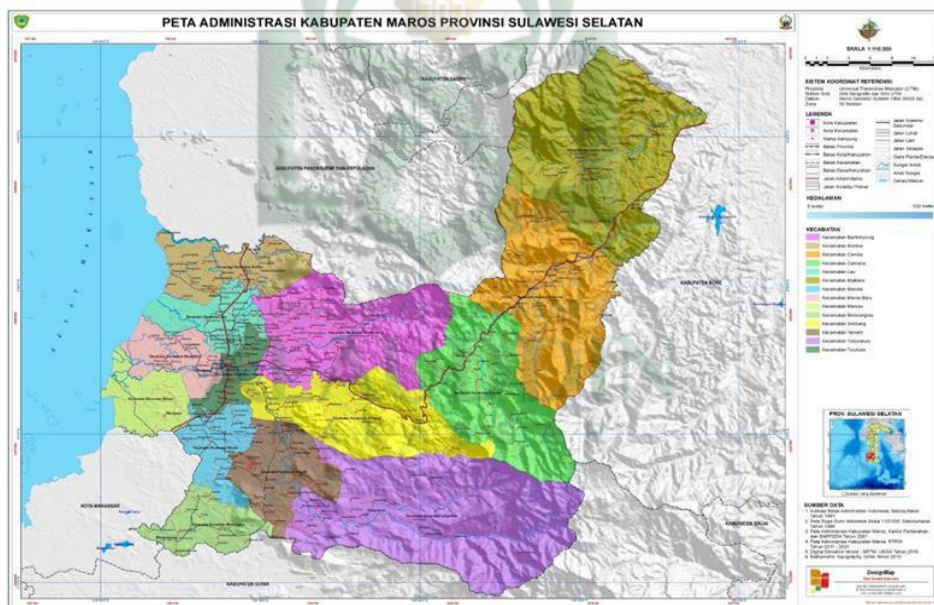
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Penelitian

Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama nomor 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Maros merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dari kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros



Pengadilan Agama Maros terletak di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros meliputi 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan dan 123 Desa yang berada di Kabupaten Maros. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kecamatan Bontoa, terdiri dari 1 kelurahan dan 8 Desa
2. Kecamatan Maros Baru, terdiri dari 3 kelurahan dan 4 Desa

3. Kecamatan Lau, terdiri dari 4 kelurahan dan 2 Desa
4. Kecamatan Camba, terdiri dari 2 kelurahan dan 6 Desa
5. Kecamatan Bantimurung, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 Desa
6. Kecamatan Tompobulu, terdiri dari 8 Desa
7. Kecamatan Turikale, terdiri dari 7 kelurahan
8. Kecamatan Tanralili, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 Desa
9. Kecamatan Moncongloe, terdiri dari 5 Desa
10. Kecamatan Marusu, terdiri dari 1 kelurahan dan 6 Desa
11. Kecamatan Mandai, terdiri dari 2 kelurahan dan 4 Desa
12. Kecamatan Simbang, terdiri dari 6 Desa
13. Kecamatan Canrana, terdiri dari 7 Desa
14. Kecamatan Mallawa, terdiri dari 1 kelurahan dan 10 Desa.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Maros

Pengadilan Agama Maros merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan Agama kelas I B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Maros terdiri dari :

1. Perkawinan
 - Izin nikah
 - Hadhanah
 - Wali adha
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami

- Hak bekas istri
- Hak bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Ekonomi syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

4. Infaq

5. Hibah

6. Wakaf

7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqoh, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Maros mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing, (vide: Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2003);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum, (vide: Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang kepegawaian, Bidang keuangan dan Bidang Umum);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan Nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1). Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maros

Berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang struktur organisasi, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Maros digambarkan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.	Ketua
Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H	Wakil
Drs. Muh. Arief M, S.H	Hakim
Dra. Sitti Johar, M.H	Hakim
Sitti Rusiah, S.Ag, M.H	Hakim
Muh. Arief Ridha, S.H., M.H	Hakim
Dra. Hj. St. Masdanah	Hakim
Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.	Hakim
Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I	Hakim
Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H	Hakim
Drs. M. Idris, S.H., M.H	Panitera
Dr. Yusran, S.Ag., M.H	Sekretaris

H. Mas'ud Taiyep	Panitera Muda Hukum
Hj. St. Munirah D, S.HI	Panitera Muda Gugatan
Nurmalasari, S.HI	Fungsional Umum/Staf
Sitti Harsani, S.Kom	Kasubag Perencanaan, T.I & Pelaporan
Nur Rahma Baharuddin, S.SI	Kasubag Kepegawaian dan
Mukarramah, S.HI	Kasubag Umum dan Keuangan
Muhammad Arsyuddin, S.PI	Fungsional Umum/ Staf
Syarifuddin L	Panitera Pengganti
Nur Qalbi Patawari, S.Ag	Panitera Pengganti
Dra. Hj. Mushayati	Panitera Pengganti
Nurwati, S.H	Panitera Pengganti
Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag	Panitera Pengganti
Atirah, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti
Saufa Jamila, S.H	Panitera Pengganti
Muhammad Ridwan, S.H	Panitera Pengganti
Dra. Haerana	Panitera Pengganti
Hj. Marlina, S.H	Panitera Pengganti
Dra St. Syahribulan	Panitera Pengganti
Muhammad Arfah, S.H	Panitera Pengganti
Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H, M.H	Panitera Pengganti
Surahmawati M, S.H	Panitera Pengganti
Nur Uliya Arif, S.H., M.H	Panitera Pengganti
Muhammad Anwar, S.Ag	Jurusita

Ramdan Mawardi, S.Sos.I	Jurusita
Fachrul Islam Yusuf	Jurusita
Arifuddin, S.Kom	Pramubakti (IT)
Baharuddin Talibe	Pramubakti (Security)
Muh. Nasrul, S.E	Pramubakti (Driver)
Hasruddin, S.H.I	Pramubakti
Hamdani, S.E	Pramubakti (Author Register)
Magfirah, S.H	Pramubakti (Administration)
Supriadi	Pramubakti (Driver)
Zainuddin	Pramubakti (Security)

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros

1. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Harta Bersama

Di dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun setelah putusan cerai yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), bahwa pengajuan gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian ataupun diajukan setelah putusan perceraian tersebut. Di dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs ini, pihak Penggugat mengajukan gugatan harta bersamanya setelah putusan perceraian.

2. Tahapan Pemeriksaan Perkara Harta Bersama

a. Sidang Pertama, Mediasi.

Pada saat sidang pertama berlangsung, Majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus menyampaikan kepada para Penggugat dan Tergugat keharusan untuk melaksanakan proses mediasi, sebagaimana yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

b. Sidang kedua, pembacaan gugatan.

Sidang kedua dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, pembacaan gugatan ini dibacakan oleh Penggugat sendiri atau bisa dibacakan oleh salah seorang Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Sebelum Tergugat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan jawaban/tanggapannya, maka Penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, ataupun mempertahankan gugatan tersebut.

c. Sidang ketiga, Jawaban Tergugat.

Setelah dibacakan gugatannya, maka Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat dapat memberikan jawaban atau tanggapannya secara langsung maupun secara tertulis.

d. Sidang ke empat, Replik Penggugat

Setelah Tergugat memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan tersebut, maka si Penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab jawaban dari Tergugat.

e. Sidang kelima, Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan Repliknya, maka Tergugat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan dupliknya. Proses ini dapat terjadi berulang-ulang sampai si Penggugat dan Tergugat mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalahnya. Namun apabila jawab menjawab dianggap sudah cukup oleh Majelis Hakim namun belum menemukan titik temu, maka akan dilanjutkan pada prosese pembuktian.

f. Sidang keenam, Pembuktian.

Pada tahap ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa surat-surat maupun saksi-saksi.

g. Sidang ketujuh, Kesimpulan Para Pihak

Pada tahapan ini, Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan perkara selama sidang berlangsung.

h. Musyawarah Majelis

Musyawarah Majelis ini bersifat rahasia sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam musyawarah ini, Majelis hakim masing-masing memberikan atau menyampaikan pertimbangan ataupun pendapatnya.

i. Putusan hakim

Setelah menyelesaikan Musyawarah Majelis, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, Majelis Hakim membackan putusan. Setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan.

D. Gambaran Umum Pemeriksaan Perkara Harta Bersama Yang Terletak Di Dua Yurisdiksi Pengadilan

1. Dasar Hukum Pemeriksaan Perkara

Dalam pandangan yuridis, dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam Pasal 188 ayat (1) HIR disebutkan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun ada pengecualian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 188 ayat 2,3, dan 4 bahwa :

- a. Apabila terdapat dua tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
- b. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat
- c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan dimana letak benda tidak bergerak tersebut berada
- d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

Bunyi Pasal di atas sesuai dengan perkara ini, bahwa Penggugat mengajukan 2 buah objek sengketa. Yang satu berada di wilayah Kabupaten Maros dan yang satunya terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Yang artinya dua objek sengketa ini berada di dua yurisdiksi pengadilan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam memutuskan perkara yang objek sengketanya berada di dua yurisdiksi pengadilan, hakim merujuk pada Pasal 142 ayat (5) R.Bg yang menyebutkan bahwa *"dalam gugatannya mengenai barang letak barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*. Makud dari Pasal tersebut adalah apabila objek sengketa berupa benda tetap dan terletak di satu wilayah hukum pengadilan, maka gugatan itu diajukan di tempat objek sengketa tersebut berada. Tetapi apabila terdapat beberapa objek sengketa yang letaknya lebih dari satu yurisdiksi pengadilan, maka penggugat bisa memilih dimana dia akan mengajukan gugatan tersebut.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Maros tetap berwenang mengadili perkara mengenai objek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tetapi apabila objek sengketa tersebut bukan satu-satunya objek sengketa dalam perkara ini. Namun apabila objek

tersebut satu-satunya objek sengketa dalam perkara ini, maka Pengadilan Agama Maros tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara ini.

Namun gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat yang terletak di Kabupaten Maros telah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, objek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua menjadi satu-satunya objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Maros tidak memiliki kewenangan relatif mengadilinya.

2. Tahapan Pemeriksaan Perkara

Tahapan pemeriksaan perkara yang terletak di beberapa yurisdiksi pengadilan hampir sama dengan tahapan pemeriksaan perkara pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah si Penggugat dapat memilih dimana dia akan mengajukan gugatan tersebut sesuai dengan tempat objek sengketa tersebut berada.

Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 142 ayat (5) R.Bg yang menyatakan bahwa *"dalam gugatannya mengenai barang letak barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*.

Jika Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi relatif, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya sampai Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

E. Analisis Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs

1. Kasus Posisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mahar dan harta bersama berdasarkan surat gugatan tanggal 7 Januari 2016, yang pada tanggal itu juga terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros

dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. adapun gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa Pnggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 29 September 1991 di Kabupaten Maros, tapi pada tahun 2001 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum tetap Perkara No.66/Pdt.G/2001/PA.Mrs. Tanggal 17 September 2001. Akte cerai Nomor 98/AC/2001/PA.Mrs;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. ML Binti M alias AR, Umur 21 tahun;
 2. SR Binti M alias AR, Umur 19 tahun;
 3. CL Binti M alias AR, Umur 11 tahun;
3. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang menjadi mahar dalam perkawinan adalah sebidang persawahan seluas ± 25 are, yang terletak di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, pada tahun 2006, tanah mahar tersebut dikena pembebasan tanah oleh PT. Semen Bosowa Maros, dengan ganti rugi berupa uang sebanyak Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh orang tua laki-laki Tergugat bernama Dg. J sebanyak Rp. 5.150.00,00 (liam juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk memperbaiki rumah di Jaya Pura dan sisanya sebanyak Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), atau senilai tiga rupiah emas, Penggugat memakai menebus tanah persawahan seluas 1.898 M2, milik S yang tergadai kepada H. N, maka tanah sawah tersebut setelah ditebus menjadi milik Penggugat, merupakan pengganti tanah mahar milik Penggugat;
4. Bahwa adapun tanah persawahan pengganti tanah mahar milik Penggugat seluas 1.898 M2 (seribu delapan ratus Sembilan puluh

delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Penggugat dan Tergugat, SPPT atas nama ML;

Sebelah Barat : Sawah milik Dg. S;

Sebelah Selatan : Sawah milik Dg. M dan Sawah milik Dg. S;

Sebelah Timur : Sawah AR Binti H. T/Sawah milik H. T.

Adapun tanah sawah Penggugat mahar milik Penggugat yang disebut obyek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat membeli satu petak tanah persawahan dari H. Loba seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), adapun satu petak tanah persawahan seluas ±1. 145 Meter persegi, yang terletak di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah milik SY/Rumah milik Sarni/Sawah milik Jappare;

Sebelah Barat : Sawah milik Dg. S;

Sebelah Selatan : Sawah milik Penggugat, SPPT atas nama SR;

Sebelah Timur : Sawah Milik AR Binti H. Tobo/Sawah milik H. T.

6. Bahwa pada tahun 2009, obyek sengketa tersebut Penggugat menerbitkan SPPT, untuk tanah persawahan seluas 1.898 M², merupakan tanah persawahan pengganti mahar milik Penggugat, SPPT No.73.08.030.014.006.0250.0 atas nama SR Binti M alias AR pada tahun 2004 tanah persawahan seluas 1.145 M² merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerbitkan SPPT No.73.08.030.014.006-0249.0 atas nama ML Binti M alias AR;
7. Bahwa pada tahun 1994, Penggugat dan Tergugat membeli tanah 2 petak, luas secara keseluruhan diperkirakan 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi) di Irian Jaya dari bapak K, seharga Rp. 1.605.00, adapun tempat atau terletak di Kelurahan/Desa Jaipuri, Kecamatan

Arso 3, Kabupaten Keerom, Provinsi Irian Jaya, mengenai batas-batas obyek sengketa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dalam perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat, telah disepakati bahwa ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah bercerai sepakat secara lisan, bahwa harta bersama yang ada di Irian Jaya menjadi bagian Tergugat dan Penggugat menyerahkan sertifikatnya kepada Tergugat, sedangkan harta bersama yang ada di Maros adalah bagian Penggugat untuk anak-anaknya, maka dari itu, Penggugat menyetujui menerbitkan SPPT atas nama anaknya sebagaimana disebutkan pada posita poin enam di atas;
9. Bahwa setelah Tergugat berada di Maros pada tahun 2015, Tergugat menjual kedua obyek sengketa tersebut baik harta bersama maupun tanah perawahan pengganti mahar milik Penggugat kepada bapak K, seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Tergugat sudah menerima uang tersebut, padahal untuk obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang ada di Maros, merupakan bagian Penggugat yang telah disepakati, oleh karena itu Penggugat keberatan dan menahan penjualan tersebut, maka sampai sekarang belum terbit akte jual beli atas nama Tergugat sebagai pihak 1 (pihak penjual) dan Bapak K sebagai pihak II (pihak pembeli) di kantor Kecamatan Bantimurung;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menjual kedua obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena sangat merugikan Penggugat, baik tanah persawahan pengganti mahar milik Penggugat dan harta bersama yang ada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan harta bersama yang ada di Kabupaten Keerom, Provinsi Irian Jaya, adalah separuh atau $\frac{1}{2}$ harta bersama adalah hak Penggugat;

11. Bahwa tanah persawahan pengganti mahar adalah milik Penggugat, maka secara hukum Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, sedangkan semua harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum harus dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat, bilamana obyek sengketa yang merupakan harta bersama tidak dapat dibagi dua, maka dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan damai secara kekeluargaan kepada Penggugat, agar obyek sengketa tanah persawahan pengganti mahar milik Penggugat dikembalikan dan harta bersama yang ada di Maros jangan dijual karena sudah diperuntukkan kedua anak tersebut, namun Tergugat tetap saja mau melanjutkan penjualan, maka usahapun sia-sia, oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Agama Maros untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut;
13. Bahwa karena sudah kuat dugaan dan sudah nyata dijual, agar obyek sengketa tidak dilanjutkan transaksi penjualan atau tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau orang lain, guna menghindari agar putusan Pengadilan Agama Maros, setelah berkekuatan hukum tetap atas kedua obyek sengketa yang ada di Kabupaten Maros;
14. Bahwa bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dilaksanakan baik secara natura/damai maupun dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, karena Penggugat merasakan sangat dirugikan, karena tidak mendapat hasil panen dari tanah persawahan tersebut, maka beralasan hukum pula kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangson), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan kepada Penggugat karena lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

15. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan yang kuat dan benar, maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs setelah melakukan pemeriksaan, maka Hakim Pengadilan Agama Maros memberikan beberapa pertimbangan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 29 September 1991 di Kabupaten Maros
2. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Februari 2016, atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan mediasi lanjutan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku sejak tanggal 4 Februari 2016, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Maret 2016, mediasi lanjutan tersebut juga tidak berhasil
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya di persidangan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil

F. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Maros

Terkait Dengan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt/G/2016/PA.Mrs

Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs merupakan perkara gugatan mahar dan harta bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqoh dan ekonomi syariah.”²⁶ Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 salah satunya adalah di bidang “Perkawinan”. Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain : pencegahan perkawinan, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, penyelesaian harta bersama, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkara mahar dan harta bersama masuk kedalam ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan mahar dan harta bersama dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. Majelis Hakim telah memberikan beberapa alasan dan pandangan yuridis nya, diataranya :

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fahimah, S.H., sesuai dengan penetapan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs tanggal 27 Januari 2016. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Para pihak lalu memohon untuk mediasi lanjutan. Oleh karena itu, proses mediasi dilanjutkan dengan mediator yang sama dengan mediator pada mediasi yang pertama kali dilaksanakan. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Maret 2016, mediator menyatakan mediasi lanjutan tidak berhasil.

Kemudian dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan mahar dan harta bersama, dengan mendalikan bahwa, mahar yang merupakan hak si Penggugat dikuasai oleh Tergugat, kemudian Tergugat menjual obyek berupa tanah perwahan yang merupakan pengganti tanah mahar milik Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalikan bahwa harta bersama yang merupakan

²⁶Republika Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49. H. 15.

hak Penggugat dan anak-anaknya yang berada di Kabupaten Maros telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai mahar dan harta bersama, antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dinyatakan tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak.

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak dinyatakan terbukti, beralasan, dan berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut dikabulkan dengan menyatakan gugatan terhadap dua obyek sengketa dalam perkara ini yang masing-masing terletak di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Oleha karena itu, obyek sengketa yang ada dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat hanya tersisa satu obyek sengketa saja, yaitu tanah yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, yang bukan merupakan yurisdiksi formal Pengadilan Agama Maros. Dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg. menyebutkan *"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*. Maksud dari Pasal di atas adalah apabila obyek sengketa berupa benda tetap (seperti tanah) dan terletak di satu wilayah hukum pengadilan, maka gugatan tersebut diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat obyek sengketa tersebut, namun apabila terdapat dua obyek sengketa dan berada lebih dari satu yurisdiksi pengadilan, maka gugatan diajukan pada salah satu pengadilan yang mewilayahi obyek sengketa.

Apabila dilihat dari substansi ketentuan Pasal tersebut dikaitkan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Maros tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mengenai obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua jika obyek tersebut bukan satu-satunya obyek sengketa

yang terdapat dalam perkara ini, namun ada obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros. Namun karena obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua secara mutatis mutandis menjadi satu-satunya obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Maros tidak memiliki kewenangan realatif untuk mengadilinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

G. Pandangan Yuridis dan Pandangan Fiqih Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami isteri. Oleh karena itu, terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama.

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus, baik putus karena kematian atau perceraian.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun isteri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau isteri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami isteri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal saja. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam masalah harta bersama diatur secara lebih lengkap mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.

Dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Sedangkan dalam Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam Pasal 86 KHI di atas bertolak belakang dengan ketentuan Pasal sebelumnya. Pasal 86 ini lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal adanya harta bersama. Pasal 85 menyebutkan bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan isteri. Kata “kemungkinan” ini menjelaskan bahwa harta bersama itu masih diperbolehkan asal tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Qur'an dan hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri. jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.²⁷

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencaharaan bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu' muamalah,

²⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h.59

tetapi ternyata tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami isteri itu. Tetapi disana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah muwafadah dan abdan*.²⁸

Menurut Amir Syarifuddin, Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami isteri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.²⁹

Kalangan Imam Syafi'i perbendapat bahwa syarikat terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam satu harta, misalnya bersyarikat membeli barang, kemudian keuntungannya untuk mereka berdua
2. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan, yang kemudian hasilnya dibagi untuk mereka bersama sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya.
3. Syarikat muwafadhah, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing. Diantara mereka ada yang mengeluarkan modal dan menerima

²⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 5, 2009), h. 270-271

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 176

keuntungan dari hasil tenaga dan modalnya. Mereka melakukan hal tersebut tanpa diketahui pihak lain

4. Syarikat wujud, yaitu syarikat yang tidak melakukan pekerjaan apapun ataupun tanpa harta. Permodalannya adalah dengan dasar kepercayaan dari pihak lain.

Syirkah 'inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan syirkah muwafadah hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tetapi tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk syirkah Abdan, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan, sedangkan mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Dalam syirkah Abdan ini, Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat.

Dari berbagai syarikat dan berbagai perbedaan pendapat dari para Imam Mazhab dan melihat praktek harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama termasuk dalam syirkah abdan/muwafadah. Dikatakan syirkah abdan karena sebagian besar suami isteri masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup untuk keluarga sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan perkara yang terletak di dua yurisdiksi pengadilan sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 142 R.Bg yang menyebutkan bahwa *"dalam gugatannya mengenai barang letak barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*
2. Pandangan hukum hakim Pengadilan Agama Maros dalam memutuskan perkara ini adalah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Hakim menjalankan prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Oleh karena mediasi tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan putusannya.
3. Pandangan yuridis dan pandangan fiqih terhadap harta bersama adalah sangat bertolak belakang. Dalam pandangan yuridis sangat jelas membahas harta bersama dalam Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dalam KHI Pasal 85-97. Sedangkan dalam pandangan Fiqih tidak ada penjelasan secara rinci dan jelas mengenai harta bersama. Sebagian ulama fiqih mengqiyaskan harta bersama kedalam syirkah/syarikat.

B. Implikasi

Berdasarkan data dan hasil analisis penulis, maka penulis memberikan implikasinya sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, khususnya yang akan mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebaiknya harus lebih memahami terlebih dahulu tata cara maupun isi gugatannya. Khususnya gugatan mengenai mahar maupun harta bersama, si Penggugat harus memahami terlebih dahulu obyek sengketa yang

akan diajukan ke pengadilan. Begitupula dengan si Tergugat, dia harus memahami hak miliknya dan hak milik si Penggugat dan anak-anaknya.

2. Untuk lembaga pemerintahan yang terkait, harus lebih teliti dan memberikan putusan seadil-adilnya untuk Penggugat dan Tergugat, agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan berbagai pihak kedepannya.

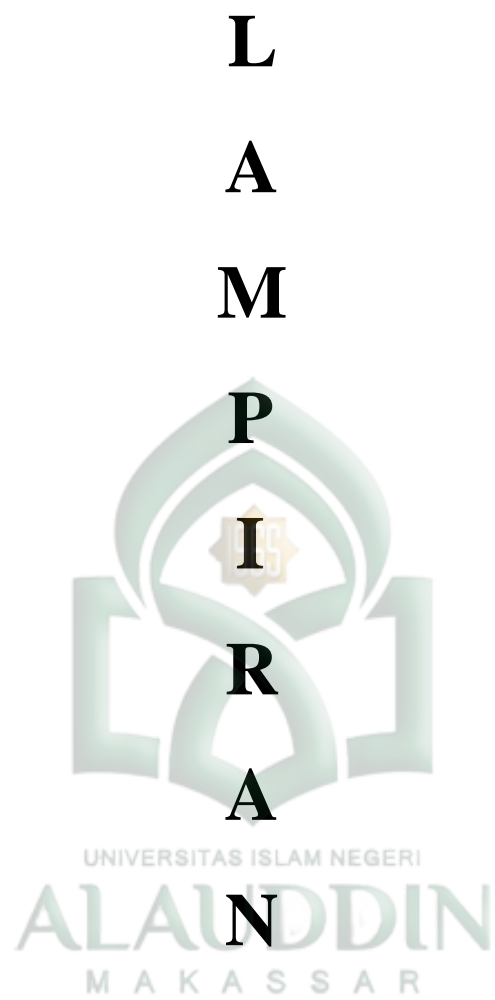


DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003
- al-Anshary, Abu Yahya Zkariya. *Fath al-Wahhab*, Juz.1; Singapura : Sulaiman Mar'iy
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar : Alauddin University Press, 2012
- Samin, Sabri dan Aroeng, Andi Narmaya. *Fikih II*, Makassar : Alauddin Press, 2010
- . *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar : Alauddin University Press, 2012
- Manan, H. Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006-2008
- . *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Zawi, Thahir Ahmad. *Tartibul Kamus al-Muhithu*, Cet. II; Darul Fikr, 1607
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum, Undang-undang No.7 Tahun 1989, Undang-undang No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.t.p, 1966/1977
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Cet. I; Jakarta : Liberty, 1999
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007
- . *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2007
- Thalib, Sayuti. 1974
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema
- Syahrani Riduan dan Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung : 1978
- Jafizham, T. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : Percetakan Mustika, 1977
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006-2008
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*
- Ismail, Muhammad Ilyas. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Makassar : Alauddin University Press, 2015

- Tajibu, Kamaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet.I, Makassar : Alauddin University Press, 2013
- Musyahid, Achmad. *Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Pengembangan Teori Hukum Modern DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*.
- Republika Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49
- Susanto Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Harahap Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Cet.5, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*.







PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB

Jalan Jend. Sudirman No. 9 Telp. (Fax) 0411-371137
 website : <http://www.pa-maros.go.id>, e-mail : admin@pa-maros.go.id
 MAROS 90511

SURAT KETERANGAN

No. : W20.A5/502/PP.01/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., M.H
 NIP : 19630317.199203.2.002
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
 Jabatan : Ketua
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Maros Kelas IB

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Latifah Nur Isnaini
 No. Stambuk : 10300116024
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)
 Judul Skripsi : “ Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor
 13/pdt.g/2016/Pa.Mrs tentang Gugatan Harta Bersama di Pengadilan
 Agama Maros”

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB, sejak tanggal 05 Juni 2020 s/d 09 Juni 2020 dan Kami telah memberikan seluruh data yang diperlukan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
 MAKASSAR



PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS

1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan pemeriksaan perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Maros ?
2. Bagaimana gambaran umum pemeriksaan perkara harta bersama yang terletak di dua yurisdiksi pengadilan ?
3. Bagaimanakah dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Maros terkait dengan gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs ?
4. Bagaimanakah pandangan yuridis dan pandangan fiqh terhadap putusan nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Latifah Nur Isnaini, Lahir di Toabo, Kecamatan Papalang, kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 29 Maret 1999. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Mulkan Yasin dan Ibu

Jami'ah. Tahap pendidikan yang telah ditempun penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Inpres Toabo II hingga lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di PPTQ Ulul Albab Solo selama kurang lebih dua tahun, kemudian melanjutkan sekolah di Mts Miftahul Ulum toabo sampai lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di MA Miftahul Ulum toabo pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dan selesai pada tahun 2020.